

**ANALISIS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIK KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : MERTA SARI
NPM : 1305170449
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Merta Sari, NPM 1305170449, Analisis Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan 2017, Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara teknik observasi, dan teknik dokumentasi, dalam penelitian teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dan kuantitatif data dikumpulkan dan dianalisis dengan membandingkan antara laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan laporan keuangan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan terjadi kesalahan dalam pencatatan kewajiban pada pada pos utang beban dan utang jangka pendek lainnya, dengan kata lain laporan keuangan yang disajikan belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual .

Kata kunci: Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur tercurah kepada Allah SWT. Sang Penggenggam Segala Urusan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan”**. Shalawat dan salam tak luput penulis hantarkan kepada Rasulullah SAW, manusia mulia dengan segala keteladanan yang ada padanya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu sudah selayaknya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Alm. Abdurrahman dan Ibunda Asnah yang telah berjuang dengan segenap kemampuan dan memberikan dukungan kasih sayang serta dorongan dan semangat kepada penulis selama ini dan juga telah mengiringi dengan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Pandapotan Ritonga SE., M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar membimbing penulis dalam penulisan proposal skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Biro Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
8. Pimpinan serta Seluruh staf pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang telah membantu dalam pengambilan data serta hal lainnya yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman- teman terbaikku Fitri Annisa , Sriwah yuni, Syahkira Zahra dan semua teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang sudah membantu dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Akhir kata kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca kita semua .

Amin, Ya rabbal Alamin.....

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2017

Penulis

MERTA SARI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoristis	7
1. Laporan Keuangan.....	7
a. Pengertian Laporan Keuangan.....	7
b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	8
2. Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor	
71 Tahun 2010.....	8
a. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna.....	9
b. Peranan dan Tujuan Pelaporan keuangan.....	11

c. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
d. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.....	13
e. Asumsi Dasar.....	14
f. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	15
g. Prinsip akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	17
h. Kendala Informasi Yang Relevan dan Andal	21
i. Struktur dan Isi	22
j. Unsur Laporan Keuangan	24
k. Pengakuan Unsur Laporan keuangan	31
l. Pengukuran Unsur Laporan keuangan.....	33
3. Penelitian terdahulu	34
B. Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Definisi Operasional.....	38
C. Tempat dan Waktu Penelitian	39
D. Jenis dan sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Deskripsi Perusahaan.....	42

2. Deskripsi Data	43
3. Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan	50
B. Pembahasan.....	56
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	56
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Neraca.....	59
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Laporan Operasional.....	62
4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Laporan Perubahan Ekuitas	64
5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Jadwal Penelitian	39
Tabel IV-1	Laporan Realisasi Anggaran.....	43
Tabel IV-2	Laporan Neraca	45
Tabel IV-3	Laporan Operasional	47
Tabel IV-4	Laporan Perubahan Ekuitas	48
Tabel IV-5	Catatan Atas Laporan Keuangan	49
Tabel IV-6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan	
Tabel IV-7	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015	50
Tabel IV-8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan	
	Neraca Tahun 2015.....	52
Tabel IV-9	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota MedanLaporan	
	Operasional Tahun 2015.....	53
Tabel IV-10	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota MedanLaporan	
	Perubahan EkuitasTahun 2015	53
Tabel IV-11	Catatan atas Laporan Keuangan	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	37
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut Good Governance. Good Governance merupakan suatu bentuk keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sebagaimana yang mereka kehendaki. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah harus dapat mengolah sumber daya yang ada dinegaranya, dan salah satu yang terpenting adalah bagaimana usaha pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya pertimabngan keuangan antara pusat dan daerah (Fauziah, 2011).

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat Pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit (Sinaga, 2005).

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Erlina Rasdianto, 2013, hal. 21).

Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana. (Indra Bastian, 2005. SAP PP No 24 Tahun 2005).

Pada laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Menurut Erlina Rasdianto (2013, hal. 10) bahwa “akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam

akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban”.

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014, hal. 37) bahwa “kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan bagian lancar Utang Jangka Panjang. Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut .

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan melakukan perlakuan akuntansi kewajiban menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kewajiban disajikan berdasarkan pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada

saat kewajiban timbul namun jika dilihat pada neraca yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan terjadi kesalahan dalam pencatatan pada pos utang beban dan utang jangka pendek lainnya dan tidak kemungkinan terjadi kesalahan pada Laporan Keuangan lainnya.

Utang Beban pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan merupakan utang beban jasa listrik yang belum dibayar. Utang Jangka pendek Lainnya merupakan kekurangan pembayaran iuran BPJS kesehatan.

Menurut Dailibas, R Nasution, Dadang Suwanda (2015, hal. 80) bahwa “utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyediaan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga”.

Laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka laporan itu tidak relevan dan tidak dapat dibandingkan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan baik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan

lengkap. Dan laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan secara internal yaitu bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun dan secara eksternal dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (Abdul Hafiz Tanjung, 2014 hal. 13).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

berdasarkan Latar Belakang dan fenomena diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut : Pada Laporan Keuangan yaitu Neraca terjadi kesalahan pada kewajiban dalam pencatatan pos utang beban dan utang jangka pendek lainnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ada beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis dalam menganalisis laporan keuangan pemerintahan dengan menggunakan Standar akuntansi pemerintahan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan.

2. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan menjadi informasi sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan yang bermutu.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dasar perluasan penelitian dan penambahan untuk pengembangannya, khususnya mengenai Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORI

C. Uraian Teoritis

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Laporan keuangan menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan “Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor”

Menurut Nordiawan,dkk (2007: 294) mengemukakan bahwa : “ laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan PP No 24 Tahun 2005 tentang SAP adalah “ merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Laporan keuangan adalah :produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan Daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemnerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Erlina, 2008:18).

2. Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksnakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas menuju Akrual paling lambat Tahun Anggaran 2015. Selain mengatur SAP Berbasis akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas menuju Akrual yang saat ini masih digunakan oleh seluruh entitas.

Basis Akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.

Manfaat basis Akrual antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan

Struktur SAP Berbasis Akrual (Lampiran I PP 71 Tahun 2010)

1. PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian laporan Keuangan
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP Nomor 03 tentang laporan arus Kas
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi
7. PSAP Nomor 07 tentang akuntansi Aset Tetap
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pekerjaan
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa Luar biasa
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan konsolidasian
12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

a. Pengguna dan Kebutuhan Informasi dalam Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2017, hal. 10) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi

dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, terhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum didalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri diluar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar yang dinyatakan lebih lanjut.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Menurut Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang terdiri :

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah
3. Masing- masing kementerian negara atau lembaga dilingkungan pemerintah pusat
4. Satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/ daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan

Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

b. Peranan dan Tujuan Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Erlina (2008: 21), setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksana kebijakan yang dipercayakan kepada entitas

pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan

Tujuan umum laporan keuangan adalah : menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, (Erlina, 2008: 20).

c. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012) komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri

dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan (*financial reports*), yang jika diuraikan meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan keuangan adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca
6. Laporan Arus kas
7. Catatan atas Laporan keuangan

d. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan bahwa

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang- undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara
2. Undang- undang dibidang keuangan negara
3. Undang- undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
4. Peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah khususnya yang mengatur keuangan daerah
5. Peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
6. Peraturan perundang- undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah dan
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah

e. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan menurut Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi pemerintahan , yang terdiri dari :

1. **Kemandirian Entitas**
Asumsi kemandirian entitas, bearti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menmyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya diluar meraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang- piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.
2. **Kesinambungan Entitas**
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah disumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

f. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah: Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2014), ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi dikatakan relevan jika memiliki kriteria dibawah ini :

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu
2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan

4. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Penyajian jujur. Informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2. Dapat diverifikasi (*variability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh
3. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

g. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

1. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan- LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima direkening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar atau asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

3. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas (*periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan

posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

6. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Penyajian Wajar (*fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam

penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

h. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah yaitu :

1. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya

menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh penggunainformasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antar dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

i. Struktur dan Isi

1) Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan standar ini.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan (Lampiran 2 : PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan) :

1. Nama entitas pelaporan atau secara identifikasi lainnya
2. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan
3. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan
4. Mata uang pelaporan
5. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan

2) Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal pelaporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut (Lampiran 2 : PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan) :

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan

Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya

adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

3) Tepat waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu (Lampiran 2 : PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan) .

j. Unsur Laporan Keuangan

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus atau defisit-LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi Kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan .

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

a. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dan cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antarlain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antar lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4) Laporan Operasional

Manfaat disusunnya laporan operasional ini, yaitu tersedianya informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sekurang-kurangnya:

a. Penadapatan-LO

Merupakan hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali

b. Beban

Merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

c. Surplus atau Defisit dari kegiatan operasional

Merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan

d. kegiatan non operasional

Merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional

e. Surplus atau defisit sebelum pos luar biasa

Merupakan penjumlahan atau pengurangan surplus atau defisit dari kegiatan operasional dengan kegiatan non operasional.

f. Pos luar biasa

Merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan

g. Surplus atau defisit –LO

Merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus atau defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

5) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara atau Daerah
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum negara atau Daerah.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus atau defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas Akhir

7) Catatan Atas laporan Keuangan

Catatan atas Laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi anggaran, Laporan perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan secara wajar. Catatan atas Laporan keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut

- 1. Mengungkapkan informasi Umum tentang Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro

3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

k. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

1) Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

2) Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pengakuan pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan –LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan.

4) Pengakuan Beban dan belanja

beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dan Rekening Kas Umum Negara atau Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

1. Pengukuran Unsur Laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran atau penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3. Penelitian Terdahulu

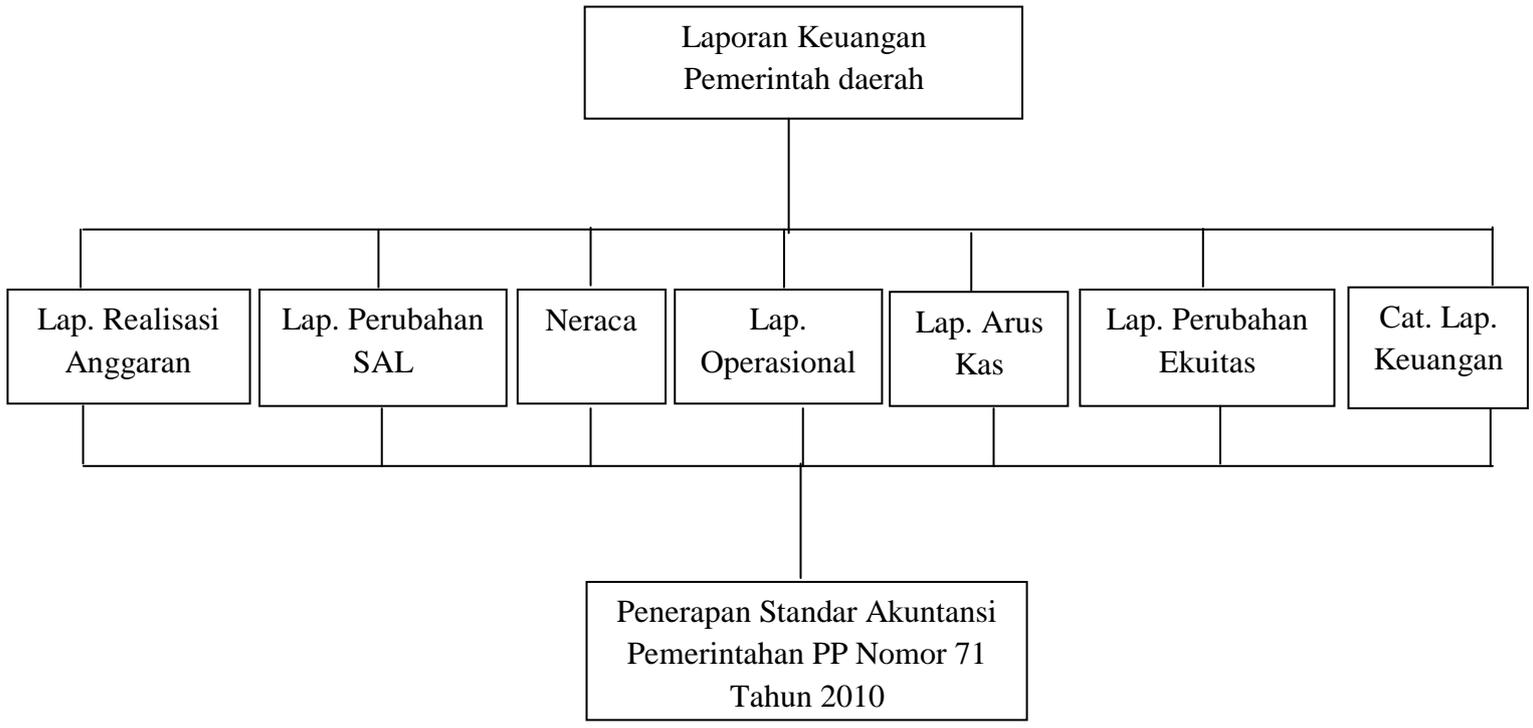
No	Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Abdul Mukhlis akuba (2011)	Analisis Implementasi Standar Akuntansi pemerintah dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo	Variabel Independent : Standar Akuntansi Pemerintah Variabel dependent : Penyajian Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Gorontalo belum menerapkan Standar Akuntansi pemerintah berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang masih mempengaruhi penerapannya.
2	Friska Langelo (2015)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung (Vol 3, No 1 (2015))	Variabel Independent : Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Variabel dependent : Penyajian Laporan Keuangan	Menunjukkan bahwa Kota Bitung belum menerapkan PP No 71 Tahun 2010 karena terdapat kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup disetiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji.
3	Sony Lamonisi (2016)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Tomohon (Vol 4, No 1 maret 2016, Hal 223-230)	Variabel Independent : Standar Akuntansi Berbasis Akrual	Pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan SAP berbasis Akrual telah melakukan pelatihan-pelatihan .Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah daerah yang sebaiknya mengkaji lebih dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang dilakukan dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual.

D. Kerangka Berfikir

Mengenai bagaimana kondisi keuangan suatu Pemerintahan diperlukan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam penyajian laporan keuangan dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan efisien. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual memungkinkan Pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. Kemudian Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual tersebut diterapkan dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Setiap entitas pelaporan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Tahun Anggaran 2015.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut, begitu juga dalam lingkup keuangan pemerintahan yang wajib menyajikan laporan keuangan atas dana yang didapatnya. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilaporkan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen,

transparansi dan keseimbangan antargenerasi. Laporan Keuangan yang dimaksud berupa Laporan Realisasi Anggaran , Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) pada periode tertentu. Laporan Operasional menunjukkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya pada periode tertentu. Laporan Arus Kas menunjukkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan Catatan Atas Laporan Keuangan menunjukkan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca dan laporan arus kas.



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini , penulis menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan tujuan mengungkapkan fakta serta mencari keterangan-keterangan sebab terjadinya masalah ini dan bagaimana pemecahannya.

Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa “ metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisa suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

B. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur variabel. Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual merupakan suatu transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka yaitu Laporan Keuangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan Catatan atas laporan keuangan

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi yaitu ditujukan langsung ketempat penulis melaksanakan riset penelitian serta studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan dan menganalisa data sekunder berupa catatan- catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dalam lingkup penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Yaitu dengan cara menganalisis data- data laporan keuangan kemudian ditarik kesimpulan dari data laporan keuangan tersebut. Data penelitian ini:

1. Menganalisis apakah laporan keuangan sudah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
2. Menganalisis berbagai macam laporan keuangan antara lain : laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan apakah sudah sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
3. Menyimpulkan apakah laporan keuangan sudah sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Perusahaan

Dinas Kependudukan merupakan instansi yang sebelumnya dikenal sebagai Kantor Catatan Sipil Kota Medan. Tugas utamanya adalah melaksanakan pencatatan sipil. Pencatatan sipil merupakan suatu upaya hukum pencatatan individu warga negara yang dilaksanakan oleh negara yang meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, status anak, dan kematian.

Struktur organisasi adalah suatu kerangka dasar yang menunjukkan hubungan yang jelas antara satu bidang dengan bidang yang lain. Potensi yang dimiliki melalui badan organisasi terlihat jelas bagaimana informasi mengalir dari satuan organisasi kesatuan lainnya, juga memberikan petunjuk tentang pembagian tugas. Dengan struktur organisasi ini maka akan jelas bagi setiap anggota dan tanggung jawabnya.

Potensi yang dimiliki melalui badan organisasi akan terlihat jelas bagaimana informasi mengalir dari satuan organisasi kesatuan lainnya, juga memberikan petunjuk tentang pembagian tugas, luasnya rentang kekuasaan atau kendali, wewenang dan tanggung jawab. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau masalah dapat lebih cepat diketahui publik yang harus bertanggung jawab serta dapat segera diselesaikan.

2. Deskripsi Data

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan kegiatan terhadap APBN atau APBD. Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus (atau defisit)-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Berikut ini adalah Perbandingan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Tabel IV-1
Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	L/RA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan	Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP No 71 Tahun 2010
Pendapatan-LRA	<ol style="list-style-type: none">1. Pendapatan LRA merupakan semua penerimaan pendapatan daerah yang diterima Bendahara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan telah disetorkan ke rekening Bendahara Umum Daerah selama tahun 20152. Pendapatan Asli Daerah-LRA merupakan pendapatan daerah bersumber dari hasil retribusi daerah	<ol style="list-style-type: none">1. semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan2. pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan
Belanja	<ol style="list-style-type: none">1. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.2. Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau pada saat pengeluaran dari bendahara mendapatkan pengesahan oleh	<ol style="list-style-type: none">1. semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.2. Diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau pada saat pengeluaran dari bendahara mendapatkan pengesahan oleh

	<p>bendahara umum daerah</p> <p>3. Metode cash basis</p> <p>4. Belanja mencakup belanja operasi dan belanja modal.</p> <p>5. Belanja operasi mencakup belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai yaitu : belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, dan belanja uang lembur PNS. Belanja barang dan jasa yaitu : Belanja bahan pakai abis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/parkir, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian khusus dan hari –hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja jasa pihak ketiga, belanja honorarium PNS, belanja hononarium Non PNS.</p> <p>6. Belanja Modal mencakup Belanja peralatan dan mesin dan belanja aset tetap lainnya. Belanja peralatan dan mesin yaitu : belanja alat bantu, alat-alat angkutan darat bermotor, alat ukur, alat pengolahan , alat kantor, peralatan dan mesin- pengadaan alat rumah tangga, alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan, alat keamanan dan perlindungan, perlengkapan kantor , mebeulair, peralatan dapur, peralatan komputer, meja kursi peja/bat, alat studio, alat komunikasi, alat kedokteran , unit – unit laboratorium, alat laboratorium, bangunan gedung, bangunan menara, aset tetap lainnya – pengadaa buku. Belanja Aset tetap lainnya yaitu : Pengadaan buku dan pengadaan barang bercorak kebudayaan.</p>	<p>bendahara umum daerah</p> <p>3. Metode cash basis</p> <p>4. belanja mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, belanja bagi hasil</p> <p>5. belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah. Belanja pegawai yaitu belanja gaji dan tunjangan, belanja tambahan penghasilan PNS, dan belanja uang lembur PNS. Belanja barang dan jasa yaitu Belanja bahan pakai abis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa rumah/gedung/parkir, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian khusus dan hari –hari tertentu, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja jasa pihak ketiga, belanja honorarium PNS, belanja hononarium Non PNS.</p> <p>6. Belanja Modal mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya. Belanja modal peralatan dan mesin yaitu belanja alat bantu, alat-alat angkutan darat bermotor, alat ukur, alat pengolahan , alat kantor, peralatan dan mesin- pengadaan alat rumah tangga, alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan, alat keamanan dan perlindungan, perlengkapan kantor , mebeulair, peralatan dapur, peralatan komputer, meja kursi pejabat, alat studio, alat komunikasi, alat kedokteran , unit – unit laboratorium, alat laboratorium, bangunan gedung, bangunan menara,</p>
--	--	--

		aset tetap lainnya – pengadaa buku. Belanja aset tetap lainnya yaitu Pengadaan buku dan pengadaan barang bercorak kebudayaan
Surplus (Defisit)	Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja dalam tahun anggaran berkenaan.	Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset non lancar. Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas selisih antara aset dan kewajiban. Berikut ini adalah perbandingan Neraca Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel IV-2
Laporan Neraca

Uraian	Neraca Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan	Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Lancar yaitu persediaan. persediaan mencakup: alat tulis kantor, ATK 2015, ATK IT, barang cetakan, cetakan umum, cetakan buku 2. Aset tetap yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya, akumulasi penyusutan 3. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar yaitu aset lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset Lancar yaitu persediaan. persediaan mencakup: alat tulis kantor, ATK 2015, ATK IT, barang cetakan, cetakan umum, cetakan buku 2. Aset tetap yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, aset tetap lainnya, akumulasi penyusutan 3. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar yaitu aset lain-lain
Kewajiban	Kewajiban jangka pendek yaitu utang beban dan utang jangka pendek lainnya.	Kewajiban jangka pendek yaitu utang perhitungan fihak ketiga, utang jangka

	<ol style="list-style-type: none"> 1. utang beban merupakan utang beban jasa listrik yang belum dibayar 2. utang jangka pendek lainnya merupakan kekurangan pembayaran iuran BPJS kesehatan dan beban rapel gaji dan lain-lain yang belum dibayar 	<p>pendek lainnya, utang bunga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utang jangka pendek lainnya merupakan penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain seperti jasa listrik 2. Utang perhitungan pihak ketiga merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti PPh, PPN, iuran askes, taspen dan taperum
Ekuitas	Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah	Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah

c. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan laporan operasional keuangan entitas akuntansi dan pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, surplus atau defisit, kegiatan non operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, surplus atau defisit-LO dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Berikut ini adalah perbandingan Laporan operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel IV-3
Lapoiran Operasional

Uraian	Laporan Operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan	Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Pendapatan-LO	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendapatan-LO mencakup seluruh penerimaan pendapatan daerah laporan realisasi anggaran 2. Pendapatan asli daerah-LO bersumber dari retribusi daerah yaitu retribusi akta catatan sipil dan formulir simduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendapatan-LO mencakup seluruh penerimaan pendapatan daerah laporan realisasi anggaran 2. Pendapatan asli daerah-LO bersumber dari retribusi daerah yaitu retribusi akta catatan sipil dan formulir simduk
Beban	<p>Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan nilai ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.</p> <p>Beban mencakup beban operasi .</p> <p>beban operasi yaitu pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. beban operasi mencakup beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyusutan dan amortisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beban pegawai yaitu beban gaji dan tunjangan, beban tambahan penghasilan PNS-LO 2. beban barang dan jasa yaitu : Beban bahan pakai habis, beban persediaan bahan/ material, beban jasa kantor , beban perawatan kendaraan bermotor , beban cetak dan penggandaan , beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir, beban sewa perlengkapan dan peralatan, beban makanan dan minuman , beban pakaian dinas dan atributnya , beban pakaian khusus hari-hari tertentu, beban perjalanan dinas , beban pemeliharaan , beban jasa konsultasi , beban honorarium PNS-LO , beban honorarium non PNS-LO , Beban Persediaan Alat Rumah Tangga. 3. beban penyusutan dan amortisasi mencakup seluruh penyesuaian terhadap 	<p>Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan nilai ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.</p> <p>Beban mencakup beban operasi .</p> <p>beban operasi yaitu pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. beban operasi mencakup beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyusutan dan amortisasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beban pegawai yaitu beban gaji dan tunjangan, beban tambahan penghasilan PNS-LO 2. beban barang dan jasa yaitu : Beban bahan pakai habis, beban persediaan bahan/ material, beban jasa kantor , beban perawatan kendaraan bermotor , beban cetak dan penggandaan , beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir, beban sewa perlengkapan dan peralatan, beban makanan dan minuman , beban pakaian dinas dan atributnya , beban pakaian khusus hari-hari tertentu, beban perjalanan dinas , beban pemeliharaan , beban jasa konsultasi , beban honorarium PNS-LO , beban honorarium non PNS-LO , Beban Persediaan Alat Rumah Tangga. 3. beban penyusutan dan amortisasi mencakup seluruh penyesuaian

	penurunan manfaat ekonomi aset tetap diluar tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dan koreksi-koreksi terhadap beban penyusutan tahun-tahun sebelumnya.	terhadap penurunan manfaat ekonomi aset tetap diluar tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dan koreksi-koreksi terhadap beban penyusutan tahun-tahun sebelumnya
Surplus(Defisit)	Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan-LO dengan beban sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan-LO dengan beban dalam tahun anggaran berkenaan.	Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan-LO dengan beban sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan-LO dengan beban dalam tahun anggaran berkenaan

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai nilai ekuitas awal, surplus atau defisit-LO dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas serta nilai ekuitas akhir. Berikut ini adalah perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel IV-4
Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Laporan perubahan ekuitas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan	Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Ekuitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekuitas awal 2. Surplus (defisit) 3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan 4. Koreksi ekuitas lainnya 5. Ekuitas akhir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekuitas awal 2. Surplus (defisit) 3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan 4. Koreksi ekuitas lainnya 5. Ekuitas akhir

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan, tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Berikut ini adalah perbandingan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tabel IV-5
Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan	Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010
1. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan	1. penyajian rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
2. menjelaskan pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan kendala dan hambatan	2. penyajian pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan kendala dan hambatan
3. menjelaskan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.	3. dasar penyajian kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
4. menjelaskan informasi yang diharuskan oleh PSAP belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan	4. penyajian informasi yang diharuskan oleh PSAP belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
5. penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi	5. penyajian informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
6. menjelaskan penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro	6. penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro

3. Penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Medan

a. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel IV-6
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015

Keterangan	Anggaran Tahun 2015 (Rp)	Realisasi Tahun 2015 (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Asli Daerah - LRA		
Pendapatan Retribusi Daerah (Retribusi Akta Catatan Sipil & formulir SIMDUK – LRA)	990.000.000,00	800.475.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	990.000.000,00	800.475.000,00
Belanja		
Belanja Operasi		
Belanja Pegawai		
Belanja gaji dan tunjangan	6.452.361.000,00	6.414.351.520,00
Belanja tambahan penghasilan PNS	4.314.537.000,00	4.298.640.000,00
Belanja uang Lembur PNS	300.000.000,00	299.810.000,00
Jumlah Belanja Pegawai	11.116.398.000,00	11.012.801.520,00
Belanja Barang dan Jasa		
Belanja Bahan pakai abis	1.324.500.000,00	959.283.619,00
Belanja bahan/material	238.800.000,00	103.210.000,00
Belanja Jasa Kantor	1.453.354.000,00	857.921.701,00
Belanja perawatan kendaraan bermotor	65.750.000,00	64.846.200,00
Belanja cetak dan penggandaan	1.793.590.000,00	831.186.000,00
Belanja sewa rumah/gedung/parkir	120.000.000,00	120.000.000,00
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	54.000.000,00	29.040.000,00
Belanja makanan dan minuman	526.650.000,00	159.712.500,00
Belanja pakaian dinas dan atributnya	93.200.000,00	87.360.000,00
Belanja pakaian khusus dan hari –hari tertentu	279.600.000,00	175.680.000,00
Belanja perjalanan dinas	369.150.000,00	292.048.000,00
Belanja pemeliharaan	851.950.000,00	461.048.000,00

Belanja jasa konsultansi	155.075.000,00	59.067.500,00
Belanja jasa pihak ketiga	1.682.650.000,00	1.347.044.000,00
Belanja honorarium PNS	1.189.060.000,00	514.600.000,00
Belanja Hononarium Non PNS	1.056.740.000,00	1.034.090.571,00
Jumlah belanja barang dan jasa	11.254.069.000,00	7.096.786.439,00
Jumlah Belanja Operasi	22.491.217.000,00	18.109.587.959,00
Belanja Modal		
Belanja Peralatan dan Mesin		
B modal pengadaan alat bantu	20.000.000,00	9.800.000,00
B modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	0,00	0,00
B modal pengadaan alat ukur	0,00	0,00
B modal pengadaan alat pengolahan	0,00	0,00
B modal pengadaan alat kantor	518.000.000,00	404.655.000,00
B modal peralatan dan mesin- pengadaan alat rumah tangga	959.150.000,00	789.015.500,00
B modal peralatan dan mesin – pengadaan alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan	264.600.000,00	254.952.000,00
B modal peralatan dan mesin – pengadaan alat keamanan dan perlindungan	227.000.000,00	184.976.000,00
B modal pengadaan perlengkapan kantor	0,00	0,00
B modal pengadaan mebeulair	0,00	0,00
B modal pengadaan peralatan dapur	0,00	0,00
B modal pengadaan peralatan komputer	775.570.210,00	417.675.500,00
B modal pengadaan meja kursi pejabat	195.000.000,00	173.550.000,00
B modal pengadaan alat studio	368.500.000,00	288.225.000,00
B modal pengadaan alat komunikasi	302.600.000,00	116.070.000,00
B modal pengadaan alat kedokteran	0,00	0,00
B modal pengadaan unit – unit laboratorium	10.500.000,00	9.900.000,00
B modal pengadaan alat laboratorium	27.150.000,00	23.600.000,00
B modal pengadaan bangunan gedung	0,00	0,00
B modal bangunan menara	0,00	0,00
B modal pengadaan aset tetap lainnya – pengadaa buku	50.000.000,00	0,00
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	3.668.070.210,00	2.672.419.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		
Pengadaan Buku	50.000.000,00	0,00
Pengadaan barang bercorak Kebudayaan	3.400.000,00	3.200.000,00
Jumlah Belanja Modal	3.721.470.210,00	2.675.619.000,00

Jumlah Belanja	26.212.687.210,00	20.785.206.959,00
Surplus/ (Defisit)	(25.222.687.210,00)	(19.984.731.959,00)

b. Neraca

Tabel IV-7
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan
Neraca Tahun 2015

Keterangan	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
Aset		
Aset Lancar		
Persediaan		
1. Alat tulis kantor	27.270.000,00	498.849.566,00
2. ATK 2015	100.001.500,00	0,00
3. ATK IT	264.660.000,00	0,00
4. barang cetakan	1.531.181.272,00	0,00
5. cetakan umum	548.671.000,00	731.070.700,00
6. cetakan buku	114.450.000,00	2.356.874.272,00
Jumlah Aset lancar	2.586.233.772,00	3.586.794.538,00
Aset Tetap		
1. Peralatan dan mesin	17.657.083.079,00	15.224.170.479,00
2. gedung dan bangunan	1.688.537.950,00	1.688.537.950,00
3. jalan irigasi jaringan	0,00	0,00
4. aset tetap lainnya	3.200.000,00	0,00
5. akumulasi penyusutan	(13.429.354.417,50)	(4.162.690.418,30)
Jumlah Aset Tetap	5.919.467.511,50	12.750.018.010,70
Aset lainnya		
Aset lain-lain	860.043,00	860.043,00
Jumlah Aset lainnya	860.043,00	860.043,00
Jumlah Aset	8.506.561.326,50	16.346.581.682,70
Kewajiban Jangka Pendek		
1. Utang Beban	28.178.427,00	13.832.045,00
2. Utang jangka pendek lainnya	143.083.651,00	10.901.296,00
Jumlah Kewajiban	171.262.078,00	24.733.341,00
Ekuitas		
1. Aset	8.506.561.326,50	16.346.581.682,70
2. Kewajiban	171.262.078,00	24.733.341,00
Jumlah Ekuitas	8.335.299.248,50	16.321.848.341,70
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	8.506.561.326,50	16.346.581.682,70

c. Laporan Operasional

Tabel IV-8
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan
Laporan Operasional
Tahun 2015

Keterangan	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Kenaikan/(penurunan) (Rp)	%
Pendapatan-LO				
Pendapatan Asli Daerah-LO				
Pendapatan Retribusi Daerah (Retribusi Akta Catatan Sipil & formulir SIMDUK – LRA)	800.475.000,00	0,00	800.475.000,00	0,00
Jumlah Pendapatan	800.475.000,00	0,00	800.475.000,00	0,00
Beban				
Beban Operasi				
1. Beban pegawai	11.021.311.875,00	0,00	11.021.311.875,00	0,00
2. Beban barang dan jasa	8.482.620.178,00	0,00	8.482.620.178,00	0,00
3. Beban penyusutan dan amortisasi	3.391.432.983,50	0,00	3.391.432.983,50	0,00
Jumlah Beban Operasi	22.895.365.036,00	0,00	22.895.365.036,00	0,00
Jumlah Beban	22.895.365.036,50	0,00	22.895.365.036,50	0,00
Surplus/(defisit)	(22.094.890.036,50)	0,00	(22.094.890.036,50)	0,00

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel IV-9
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan
Laporan Perubahan Ekuitas
Tahun 2015

Keterangan	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)
Ekuitas awal	16.321.848.341,70	16.346.581.682,70
Surplus/(Defisit)	(22.094.890.036,50)	0,00
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	19.984.731.959,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(5.876.391.015,70)	(24.733.341,00)
Ekuitas akhir	8.335.299.248,50	16.321.848.341,70

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel IV-10
Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur dan Isi Catatan Atas Laporan Keuangan	Uraian Catatan Atas laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan
<p>1. Penyajian Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi</p> <p>2. penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro</p> <p>3. Penyajian pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target</p> <p>4. dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan</p>	<p>1. Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kependudukan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Adapun fungsinya, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan penduduk. b. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang kependudukan. c. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya. d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. <p>2. secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan dalam rencana kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Tahun 2015 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%.</p> <p>3. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidak keberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.</p> <p>4. Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Medan dalam penyampaian laporan Keuangan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota</p>

<p>5. penyajian rincian dan penejelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan</p>	<p>Medan dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.</p> <p>Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2015 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.</p> <p>5. Pendapatan Diterima Di Muka</p> <p>Sebelum penerapan Basis Akruai, semua pendapatan yang diterima pada saat itu dianggap pendapatan tahun berjalan. Dengan penerapan Basis Akruai, maka pendapatan yang diterima dipisahkan antara pendapatan tahun berjalan dengan tahun yang akan datang, sehingga tidak seluruh saldo pendapatan yang diterima pada tahun 2015 diakui sebagai pendapatan. Pendapatan yang diterima pada tahun 2015, namun untuk pendapatan di tahun setelah tahun 2015, maka dimasukkan pada Pendapatan Diterima Di Muka.</p> <p>Konstruksi Dalam Pengerjaan</p> <p>Dengan penerapan Basis Akruai, maka Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diakui berdasarkan persentase fisik/pekerjaan.</p> <p>Piutang Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>Dengan penerapan Basis Akruai, maka Piutang Pajak dan Retribusi diakui berdasarkan perbandingan ketetapan pajak dan retribusi, serta Saldonya.</p> <p>Penyisihan Piutang</p> <p>Dengan penerapan Basis Akruai maka Piutang disajikan berdasarkan harga perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Reliazable Value) dengan pengelompokan piutang berdasarkan tingkat ketertagihan sesuai umur piutang (aging schedule).Penyisihan piutang disajikan di neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.</p> <p>Utang Beban</p> <p>Dengan penerapan Basis Akruai maka kewajiban yang timbul atas beban pegawai dan barang/jasa yang belum dibayarkan di tahun 2015 diakui sebagai utang beban.</p>
--	---

<p>6. pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan</p> <p>7. pengungkapan-pengungkapan lainnya</p>	<p>Piutang/Utang kepada Pihak Ketiga dan Piutang Lain-lain Piutang/utang kepada Pihak Ketiga timbul karena penerapan Basis Akrual berdasarkan perbandingan antara saldo fisik/pekerjaan dengan saldo keuangan. Apabila saldo keuangan lebih besar daripada fisik, maka timbul Piutang Kepada Pihak Ketiga. Demikian pula sebaliknya, apabila Saldo fisik/pekerjaan lebih besar daripada keuangan, maka timbul Utang Kepada Pihak Ketiga.</p> <p>6. kontinjensi Tidak terdapat kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang mempengaruhi laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan per 31 Desember 2015.</p> <p>Komitmen Tidak ada kejadian penting dalam komitmen pada Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Tahun Anggaran 2015</p> <p>7. Kejadian penting setelah tanggal neraca (<i>subsequent event</i>) Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca (31 Desember 2015) yang mempengaruhi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2015.</p>
--	---

B. Pembahasan

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan maupun surplus (defisit). Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan menyajikan rekening pendapatan, belanja, surplus/(defisit) dan realisasinya. Walaupun dalam prakteknya sering kali realisasinya jauh lebih besar atau lebih kecil yang dianggarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dengan anggaran Rp990.000.000,00 yang bersumber dari hasil retribusi daerah dengan realisasinya Rp800.475.000,00. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 80,86% dari anggaran sebesar Rp990.000.000,00 disebabkan adanya peraturan daerah nomor 1 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Begitu juga dengan rekening belanja jumlah belanja yang dianggarkan Rp26.212.687.210,00 dengan realisasinya sebesar Rp20.785.206.959,00. Belanja Operasi yang dianggarkan Rp22.491.217.000,00 dengan realisasinya Rp16.109.587.959,00. Belanja Operasi didapat dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, realisasi belanja pegawai sebesar Rp11.012.801.520,00 atau 99% dari anggaran sebesar Rp11.066.898.000,00. Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp7.096.786.439,00 dengan anggaran sebesar Rp11.254.069.000,00. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp3.721.470.210,00 dengan realisasinya sebesar Rp2.675.619.000,00. Belanja modal bersumber dari belanja peralatan dan mesin dan belanja aset tetap lainnya. Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar Rp2.672.419.000,00 atau 72,85% dari nilai anggaran sebesar Rp3.668.070.210,00. Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar Rp 3.200.000,00 dari anggaran sebesar Rp53.400.000,00. Realisasi tahun 2015 mengalami defisit sebesar (Rp19.984.731.959,00) yang

merupakan selisih kurang antara jumlah realisasi pendapatan dengan jumlah realisasi belanja dengan anggaran sebesar (Rp25.222.687.210,00). Meskipun dana yang dianggarkan tidak dapat terealisasi sepenuhnya, tapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dengan baik. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah menyajikan berupa perhitungan atau pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran, baik pada kelompok pendapatan maupun kelompok belanja. Pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, dan belanja. Pendapatan telah diakui pada saat penerimaan rekening kas daerah, pendapatan sudah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. selisih lebih kurang antara pendapatan dengan belanja telah dicatat dalam surplus/(defisit).

Hal ini juga sesuai dengan Abdul Hafiz Tanjung (2014. hal 49) bahwa struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus(defisit), pembiayaan dan sisa lebih kurang pembiayaan anggaran (siLPa/SiKPA). Pendapatan diakui saat penerimaan rekening kas umum negara/daerah. Belanja diakui saat pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Surplus/(defisit) merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode. Dalam penelitian terdahulu oleh Abdul Muklis Akuba dengan judul Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset non lancar. Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitas selisih antara aset dan kewajiban.

Pada penyajian Neraca Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pada Tahun 2014 pada pos aset, jumlah aset lancar sebesar Rp3.595.703.629,00 jumlah aset tetap sebesar Rp12.750.018.010,70 jumlah aset lainnya sebesar Rp860.043,00. Maka total Aset Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebesar Rp16.346.581.682,70. Pada pos kewajiban jangka pendek Tahun 2014 sebesar Rp24.733.341,00 jumlah Ekuitas Tahun 2014 sebesar Rp16.321.848.341,70. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp16.346.581.682,70. Pada tahun anggaran 2015 pada pos aset, jumlah aset lancar sebesar Rp2.586.233.772,00 jumlah aset tetap sebesar Rp5.919.467.511,50 jumlah aset lainnya sebesar Rp860.043,00. Maka total Aset Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebesar Rp8.506.561.326,50. Pada pos kewajiban jangka pendek Tahun 2015 sebesar Rp171.262.078,00 jumlah Ekuitas Tahun

2015 sebesar Rp8.335.299.248,50. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp8.506.561.326,50

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah menyajikan informasi Aset, kewajiban, dan Ekuitas pada akhir tahun anggaran. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar, Aset tetap dan Aset Lainnya, pos-pos Aset lancar, Aset tetap dan Aset lainnya telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun pada Kewajiban Jangka Pendek Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah salah dalam mengklasifikasikan pencatatan utang beban dan utang jangka pendek lainnya yang tidak mengacu pada standar akuntansi pemerintahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Kewajiban jangka pendek yang disajikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yaitu utang beban yang merupakan utang beban jasa listrik tidak dimasukkan kedalam utang jangka pendek lainnya, seperti yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku bahwa utang jangka pendek lainnya merupakan penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain seperti pembayaran listrik. Utang jangka pendek lainnya yang disajikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan merupakan pembayaran iuran BPJS tidak sesuai pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, dimana berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pembayaran iuran BPJS masuk kedalam Utang perhitungan pihak ketiga. Penyajian Ekuitas Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban sudah sesuai dengan yang diungkapkan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 , dimana berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Hal ini juga didukung oleh Dailibas, R. Nasution dan Dadang suwanda (2015) bahwa aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan aset non lancar. Utang jangka pendek lainnya yang tidak termasuk kategori yang ada termasuk dalam utang jangka pendek lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Utang perhitungan fihak ketiga disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan maka laporan itu tidak relevan dan tidak dapat dibandingkan. Dalam penelitian terdahulu Abdul Muklis Akuba dengan judul Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah menyajikan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. Pemerintah Kota Gorontalo telah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta telah mengklasifikasikan kewajibannya sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban telah diklasifikasikan sesuai dengan waktu pembayarannya. Ekuitas dana telah disajikan dalam neraca yang terdiri dari

ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Pos-pos neraca Pemerintah Kota Gorontalo telah dicantumkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Gorontalo.

3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan laporan operasional keuangan entitas akuntansi dan pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, surplus atau defisit, kegiatan non operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, surplus atau defisit-LO dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pada Laporan Operasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan menyajikan rekening pendapatan, beban, surplus/(defisit). Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok pendapatan asli daerah (PAD) dengan saldo tahun 2015 sebesar Rp800.475.000,00. Begitu juga dengan rekening beban jumlah saldo beban tahun 2015 sebesar Rp22.895.365.036,50. Beban Operasi sebesar Rp22.895.365.036,50 mencakup seluruh pengeluaran belanja operasi yaitu Beban pegawai sebesar Rp11.021.311.875,00 beban barang dan jasa sebesar Rp8.482.620.178,00 beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp3.391.432.983,50 dengan realisasinya Rp16.109.587.959,00. Laporan Operasional Tahun 2015 mengalami defisit sebesar (Rp22.895.365.036,50). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah menyajikan Laporan Operasional dengan baik. Laporan Operasioanl Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Medan telah menyajikan berupa perhitungan atau pelaksanaan dari mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.. Pos-pos pada Laporan Operasioanl telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.. Pendapatan telah diakui pada saat penerimaan rekening kas daerah, pendapatan sudah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Beban diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. selisih lebih kurang antara pendapatan dengan beban telah dicatat dalam surplus/(defisit).

Hal ini juga sesuai dengan Abdul Hafiz Tanjung (2014. hal 58) bahwa laporan operasional terdiri dari pos-pos :pendapatan-LO, beban, surplus atau defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, surplus atau defisit-LO. Dimana pendapatan merupakan hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai nilai ekuitas awal, surplus atau defisit-LO dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas serta nilai ekuitas akhir.

Ekuita awal tahun 2015 sebesar Rp16.321.848.341,70 dan tahun 2014 sebesar Rp16.346.581.682,70. Saldo Ekuita awal tahun 2015 sebesar Rp16.321.848.341,70 mengalami penurunan sebesar 1% yang dipengaruhi oleh pengakuan beban dan pendapatan yang disajikan sebagai koreksi ekuitas ditahun 2014. Defisit atas pengakuan pendapatan-LO dan beban yang disajikan sebesar (Rp22.094.890.036,50).Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp19.984.731.959,00. Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2015 dan 2014 sebesar (Rp5.876.391.015,70) dan (Rp24.733.341,00). Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2015 sebesar Rp8.335.299.248,50 mengalami penurunan sebesar 0,96% yang dipengaruhi surplus/defisit-LO tahun 2015 sebesar (Rp22.094.890.036,50) dan koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp5.876.391.015,70). Dalam penyajian laporan perubahan ekuitas Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pos-pos yang telah disajikan secara benar dan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Hal ini juga sesuai dengan Abdul Hafiz Tanjung (2014. hal 65) bahwa Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya Ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi

ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan Ekuitas akhir.

5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Sebagaimana seperti teori-teori yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi-informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti standar berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diahruskan dan dianjurkan oleh PSAP. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah menyajikan catatan atas laporan keuangan yang berisi dasar penyusunan laporan ekuangan daerah dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian

penting lainnya, pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis kas atas pendapatan dan belanja serta basis akrual untuk pencatatan aset, kewajiban, dan ekuitas dana (neraca)..

Hal ini juga sesuai dengan yang diungkapkan Abdul Hafiz Tanjung (2014, hal 66) bahwa catatan atas laporan keuangan mengungkapkan atau menyajikan atau menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- b. Menyediakan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro
- c. menyediakan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, dan tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan secara keseluruhan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan, karena terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan yaitu neraca pada kewajiban pos utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhadap penyajian pendapatan, beban, dan surplus(defisit) dalam laporan realisasi anggaran telah sesuai dalam menerapkan dasar- dasar penyajian laporan realisasi anggaran yang disesuaikan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan operasional yang disajikan telah sesuai dan seluruhnya mengacu pada standar akuntansi pemerintahanPeraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
4. Penerapan Standar Akuntansi PemerintahanPeraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan perubahan ekuitas telah sesuai dan

seluruhnya mengacu pada standar akuntansi pemerintahan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhadap catatan atas laporan keuangan juga telah sesuai dalam mengungkapkan informasi-informasi yang terdapat pada laporan keuangan lainnya yang dibutuhkan untuk menghasilkan penyajian laporan secara wajar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan penelitian yang dilakukan penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pemerintahan ataupun bidang keilmuan akuntansi dimasa yang akan datang guna untuk melakukan perbaikan, adapun saran dan masukan sesuai dengan kemampuan penulis adalah :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar menerapkan sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.
2. Sebaiknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan melakukan pengklasifikasian pada setiap akun agar laporan keuangan menjadi relevan dan mudah dipahami.
3. Agar sebagian besar penerapan kebijakan akuntansi yang telah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan untuk tetap konsisten agar laporan keuangan memiliki tingkat keandalan yang tinggi.
4. Bagi pihak terkait dalam ilmu akuntansi agar terus melakukan pengembangan dan pembaharuan terhadap standar akuntansi keuangan terutama hal yang

mengatur tentang penyajian laporan keuangan mengingat laporan keuangan sangat penting bagi setiap entitas pelaporan.

5. Bagi mahasiswa akuntansi agar lebih memahami dan mempelajari tentang penyajian laporan keuangan mengingat laporan keuangan merupakan hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa akuntansi agar mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan.
6. Bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih baik dari yang penulis lakukan terutama dalam standar akuntansi pemerintahan agar bisa dijadikan sebagai perbandingan seandainya melakukan penelitian dengan judul yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Abdul Halim (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Abdul Mukhlis Akuba (2011). *Analisis Implementasi Standar Akuntansi pemerintah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo*.
- Azuar Juliadi dan Irfan (2013). *Metodologi Penelitian kuantitatif*. cetakan pertama, penerbit : CitapustakaMedan Perintis
- Abdul Hafiz Tanjung (2014). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*. Cetakan Ketiga. Bandung: CV. Alfabeta.
- Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Dailibas, R.Nasution, dan Dadang Suwanda (2015). *Bagan Akun Standar (Sistem Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah)*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Deddi Nordiawan, dkk (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat
- Erlina Rusdianto (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Penerbit Brama Ardian
- Friska Langelo, (2015). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*.
- Hans Kartikahadi, R.U. (2012). *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta : Salemba Empat
- Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik. Konsep Dasar Untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Kusnadi (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung : UNIBRA W Malang
- Komite Standard Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Nomor 22. *Akuntansi Utang Berbasis Akrua*.

Komite Standard Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Nomor 08. *Akuntansi Utang*

Noor Afa Shiddiq (2015). *Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrua*.
.http//powerpointsapakrua.co.id diakses pada tanggal 06 Februari 2017

Nordiawan, Deddi dkk (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2002). *Analisis laporan Keuangan*.
Yogyakarta: UPP AMK YKPN

Revrison Baswir (2000). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
Yogyakarta

S. Munawir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta :
Liberty

Sony Lamonisi, (2016). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua
pada Pemerintah Kota Tomohon*.

Syidi (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika
Aditama